

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian utama masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bertani. Tidak hanya itu saja Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim, karena Indonesia memiliki luas wilayah perairan atau laut lebih luas dari pada daratannya, sehingga masyarakat Indonesia sebagian besar ada yang menjadi nelayan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar¹ sehingga peran sektor pesisir, kelautan, perikanan, dan pertambangan memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian Indonesia.²

Laut adalah salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia, digunakan untuk tempat wisata laut, sebagai jalur perjalanan maupun penyeberangan laut, untuk pengiriman barang dengan kapal barang dan kegiatan penangkapan ikan (sebagai mata pencaharian para

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Dkp.jatengprov.go.id>dokumen>kak, diakses 16 september 2016, 19.30 WIB

nelayan). Kegiatan-kegiatan di laut tersebut, dapat menimbulkan dampak positif yaitu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang usaha, meningkatkan penerimaan devisa negara, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Selain dampak positif, dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan di laut tersebut juga menimbulkan dampak negatif yang berupa pencemaran laut dari limbah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan, kegiatan perminyakan seperti bocornya pipa minyak, oli yang di buang oleh kapal-kapal besar baik sengaja maupun tidak sengaja, penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan trawl (pukat) serta jutaan mesin kendaraan bermotor yang menjatuhkan sejumlah kecil minyak setiap hari ke jalan dan tempat parkir .⁴ Meskipun terjadi di darat, kegiatan tersebut dapat mempengaruhi laut, jika limbah dari darat jatuh atau mengalir ke laut.

Akibat dari pencemaran laut itu dapat menimbulkan bencana bagi semua kehidupan laut termasuk terumbu karang, tumbuhan laut, dan ikan. Pencemaran laut juga menyebabkan menipisnya oksigen terlarut dalam air, yang membuat sulit bagi berbagai hewan laut untuk bernafas. Walaupun manusia tidak secara langsung dipengaruhi oleh pencemaran air laut, kehidupan laut merupakan sumber makanan bagi manusia.⁵ Apabila air laut tercemar, maka banyak ikan yang terkena racun, sehingga kualitas ikan

³ Ade Masya Resa ,Dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan, studioriau.com/artikel/lingkungan/dampak-pembangunan-pariwisata.html, tanggal 15 September 2016, 22.52 WIB

⁴ Lingkungan hidup bumi kita, www.lingkunganhidup.co/pencemaran-laut-di-indonesia-dan-dampaknya/, 9 oktober 2016, 20.05 WIB

⁵ Penyebab pencemaran laut, <https://www.wedaran.com/19575/penyebab-pencemaran-laut/> , 9 Oktober 2016, 20.23WIB.

menurun dan banyak ikan yang mati. Sehingga mengakibatkan penurunan hasil penangkapan ikan oleh nelayan di laut.

Upaya perlindungan lingkungan laut sangat dibutuhkan untuk mengendalikan bahkan mencegah terjadinya pencemaran, terutama pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan kapal perikanan. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia terutama lingkungan laut harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Tidak hanya melakukan pencegahan pencemaran dari kapal saja, melainkan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan juga, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, bahwa penyelenggaraan perlindungan maritim dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang pengendalian Pencemaran lingkungan laut, perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. Upaya pengawasan dan pemantauan di bidang perikanan dan kelautan dengan keberadaan kapal perikanan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah perairan perikanan di Indonesia merupakan suatu kewajiban pokok untuk mencegah terjadinya pencemaran laut akibat

kegiatan kapal perikanan.⁶ Permasalahan pencemaran lingkungan laut ini sangat penting, karena mempengaruhi perekonomian para nelayan di laut. Selain untuk mencegah pencemaran, perlindungan laut juga mencakup persoalan-persoalan seperti pengambilan ikan yang berlebihan *over fishing*, cara-cara penangkapan ikan yang merusak, perusakan habitat, pelestarian jenis-jenis kekayaan hayati yang terancam kemusnahan.⁷ Seperti halnya kecamatan Juwana yang memiliki pelabuhan bernama Bajomulyo, yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal perikanan. Akibat kegiatan kapal di sana seperti pembuangan minyak, oli, sampah plastik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja di lingkungan laut dalam jumlah kecil hingga besar, maka laut menjadi tercemar. Pada akhirnya berpengaruh pada hasil tangkapan ikan dari para nelayan terutama nelayan kecil. Dampak dari pencemaran lingkungan laut yaitu hasil tangkapan berkurang karena ikan banyak yang mati, atau kualitas ikan menurun, sehingga menimbulkan penurunan pendapatan ekonomi dari nelayan.

Dari latarbelakang masalah diatas, maka dirumuskan judul penulisan sebagai berikut : “ **Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Laut dari kegiatan Kapal perikanan di Juwana kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah**”

⁶ H.Supriyadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 356

⁷ Mochtar Kusuma Atmaja, 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Penerbit Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, hlm.8

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaturan kegiatan perikanan yang melindungi lingkungan laut untuk masa depan di Juwana kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah ?

C.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah dan aturan yang melindungi lingkungan laut di masa depan di Juwana kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah.

D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang lingkungan laut, tentang aspek hukum perlindungan lingkungan laut khususnya dalam kegiatan kapal perikanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapat inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu

peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan lingkungan laut akibat dari kegiatan kapal perikanan.

- b. Masyarakat, agar dapat mengawasi kegiatan – kegiatan kapal penangkapan ikan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bagi fakultas hukum atmajaya yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan – kegiatan kapal perikanan.
- d. Penulis, sebagai syarat memperoleh kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada fakultas hukum universitas atmajaya yogyakarta.

E. Keslian Penelitian

Penelitian ini tentang “ Aspek Hukum Perlindungan Laut dari kegiatan kapal perikanan di juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah” merupakan karya asli penulis bukan hasil plagiasi dari karya penulis lain. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa lainnya. Seperti halnya yang penulis temukan.

Judul penulisan “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah di Damudera Pasifik (The Great Pacific Garbage Patch)” dari Muharlis, NPM B 111 08 402 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana dampak ekologis dan dampak ekonomi dari pencemaran limbah sampah di

samudera pasifik ? dan Bagaimanakah tanggung jawab negara tepi terhadap pencemaran limbah sampah di samudera pasifik ?. Hasil Penelitiannya adalah Sampah yang terakumulasi di wilayah The Great Pacific Garbage Patch mayoritas plastik. Plastik dapat menjadi media bahan kimia beracun, baik karena kemampuan plastik yang dapat menyerap bahan kimia beracun yang berasal dari plastik itu sendiri. Dampak ekologis yang ditimbulkan oleh sampah laut berupa perubahan fisik pada habitat yang dapat menyebabkan penurunan pada spesies yang bergantung pada habitat tersebut, lingkungan yang terkontaminasi bahan kimia beracun, hewan laut yang menelan ataupun terbelit sampah laut yang menyebabkan cedera bahkan kematian manusia. Tanggung jawab dan kewajiban negara berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional diatur dalam Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972 and 1996 protocol thereto, international Convention for the prevention of pollution from ship 1973/1978 (MARPOL 1973/1978) dan konvensi hukum laut 1982 (UNCLOS). Negara-negara tepi Samudera Pasifik bagian utara harus melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan ketiga konvensi tersebut, meskipun salah satu negara, yaitu Amerika Serikat, belum meratifikasi UNCLOS 1982. Dalam praktiknya, negara-negara tepi telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir sampah plastik baik dengan menetapkan aturan nasional maupun dengan tindakan-tindakan pencegahan dengan cara memasang penyaring sampah pada saluran air atau sungai. Akan tetapi negara-negara tepi Samudera Pasifik bagian utara

belum melakukan kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik.

Judul Penulisan “Aspek hukum pengelolaan Limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di kabupaten bantul” dari eklesia satyagraha, NPM 050509007 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah industri di kabupaten bantul sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ? dan kendala – kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di kabupaten bantul ?. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Prindustrian. Pembangunan Industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, belum dilaksanakan secara tegas dan penuh . Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan lingkungan terlebih dahulu. Pemerintah terlalu ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri kecil, dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyatnya. Adapun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul yaitu :

- a. Adanya keterbatasan biaya dalam hal teknologi yang Mengakibatkan hasil belum maksimal dalam pengelolaannya.
- b. Tidak adanya tenaga ahli yang benar-benar mengerti tentang cara mengelola limbah yang benar sehingga menghasilkan limbah yang sesuai dengan kriteria.
- c. Belum ada sanksi tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran karena Badan Lingkungan Hidup baru melaksanakan penyuluhan baru-baru ini sehingga pelaku usaha tidak begitu mengenal adanya peraturan tentang pengelolaan limbah yang sesuai dengan kriteria.

Judul penulisan “pengaturan tanggung jawab pemerintah australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* yang merugikan indonesia (studi kasus pencemaran lintas batas oleh PT, Exploration and production australia)” dari Mawar Fitriany NPM 120510846, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat seabed oil mining oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesia? Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat seabed oil mining oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesiamesti dituangkan dalam bentuk bilateral agreement antara Australia dan Indonesia, dan bilateral agreement tersebut mesti mengatur

halhal pokok, yakni unsur tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab negara, macam tanggung jawab negara, lembaga yang menghitung besaran kompensasi, perbedaan tanggung jawab antara pemerintah negara dengan operator (perusahaan minyak), penghapusan tanggung jawab, wilayah keberlakuan agreement serta kualifikasi oil mining dalam arti off-shore oil mining atau deep sea oil mining.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Murhalis menekankan tentang Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah di Damudera Pasifik, Eklesia satyagraha pada Aspek hukum pengelolaan Limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di kabupaten bantul, dan Mawar Firiany pada pengaturan tanggung jawab pemerintah australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* yang merugikan indonesia (studi kasus pencemaran lintas batas oleh PT, Exporation and production australia), maka penulis menekankan pada aspek hukum perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Yang dimaksud dengan aspek hukum dalam penelitian ini ialah tinjauan terhadap objek yang diteliti, yaitu lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif.

2. Perlindungan Lingkungan Laut

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.⁸

3. kapal perikanan

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial sebagai data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung.

⁸ Undang-undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 1 butir 10

⁹ Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 butir 9

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai objek yang diteliti yaitu Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Kapal Perikanan yang ada di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, meliputi:

a) Undang-Undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

b) Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- 
- d) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 Tahun 1999.
 - h) Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum, statistik dari instansi resmi dan narasumber yang berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Kapal Perikanan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi dan dokumen.

c. Kuesioner

Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada para responden agar memperoleh data berupa

informasi yang berkaitan dengan kegiatan kapal perikanan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

d. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Bajomulyo Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi memiliki pengertian yaitu keseluruhan obyek yang akan menjadi pengamat peneliti, yaitu terhadap kegiatan kapal perikanan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

b. Sample yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagian atau contoh populasi. Penentuan sample ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sample yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari populasi yang sudah diketahui.

6. Responden, Narasumber dan Observasi

a. Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan kuesioner yang terkait langsung dengan

permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Ernowo selaku salah satu pemilik kapal di Juwana.
- 2) Bapak Haryanto selaku salah satu pemilik kapal dan memasarkan hasil tangkapan ikan dari kapalnya sendiri di Juwana.

b. Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Suharto selaku Bagian Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Bapak Edy Budiyo selaku Petugas Tata Usaha Pelabuhan Bajomulyo di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bapak Jamari selaku Kepala Paguyuban Perikanan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

c. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis. Analisis yang dilakukan ialah dengan membaca, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data itu sehingga dapat memperoleh gambaran akan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu berawal dari hal-hal umum ke khusus. Yang dimaksud dengan hal umum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan nasional atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk ditarik kesimpulan tentang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.